



RENCANA AKSI KINERJA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



2025



**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA 2025
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 (satu) tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur,
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
3. Dasar Penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana Aksi Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Indikator Kinerja Utama.

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja Tahun 2025 menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB dalam menjalankan aktivitasnya.

Pangkalan Kerinci, 06 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


ANDRY SIMBOLON, SH.,MH
NIP. 19810720 200312 1 002

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.				
		Perdata	90%	90%	90%	90%
		Pidana	90%	90%	90%	90%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	85%	85%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	90%	90%	90%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	1%	1%	1%	1%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	95%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu								
1	Mendata Mengedintifikasi dan mengevaluasi perkara perdata dan pidana yang lebih dari 5 bulan, melaporkan dan mencari solusi yang tepat.	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perdata dan pidana	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata)
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	Terdatanya jumlah perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 196.605.000,- (Pidana)
3	Melaksanakan persidangan sesuai asa persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan	Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan Manajemen	

						sidang yang tidak terlalu lama	Hukum	Peradilan Umum	
5	Memutus perkara perdata dan pidana tidak melebihi waktu 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata pidana yang diputus	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6	Mencoret perkara perdata pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	Perkara perdata pidana yang sudah melebihi batas waktu	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No .	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.2	Indikator : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.								
1	Mendata Perkara yang diajukan untuk restoratif					Terdada dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana secara restorative.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 196.605.000,-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat					Terdatanya jumlah perkara pidana yang diselesaikan dengan restoratif	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.3	Indikator : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding								
1	Menyusun putusan perkara yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	Putusan perkara perdata dan pidana yang berkualitas	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata)
2	Mendata Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	✓	✓	✓	✓	Terdatanya perkara perdata, pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 196.605.000,- (Pidana)

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.4	Indikator : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi								
1	Mendata Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	✓	✓	✓	✓	Terdatanya perkara perdata, pidana yang tidak melakukan upaya hukum banding	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata) Bersumber dari DIPA 03 Rp. 196.605.000,- (Pidana)

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.5	Indikator : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.								
1	Menyusun putusan perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi secara berkualitas	✓	✓	✓	✓	Putusan perkara anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan kemanfaatan dan tujuan hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 196.605.000,-
2	Mendata Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	✓	✓	✓	✓	Terdatanya perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.6	Indikator : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.								
1	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Terbentuknya Tim Survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 5.512.950.000,-
2	Menyusun Jod Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Jod Description SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
3	Menyusun Jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Jadwal dan perangkat SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
4	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	✓	✓	✓	✓	Kuesioner SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
5	Mendata dan merekap hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Data hasil SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
6	Menyusukan Laporan Hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Laporan SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	✓	✓	✓	✓	Laporan tindak lanjut hasil survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 100%	90% 100%	90% 100%	90% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2%	2%	2%

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
2.1	Indikator : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.								
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	Jadwal sidang tundaan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	BAS	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	✓	✓	✓	✓	Putusan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	✓	✓	✓	✓	Data Putusan di SIPP	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (edoc)	✓	✓	✓	✓	e-doc salinan putusan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.2	Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi								
1	Mendata Perkara yang yang diselesaikan melalui mediasi	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari biaya proses para pihak berperkara

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA	NA	NA	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
3.1	Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan								
1	Mendata Perkara yang mendapatkan layanan hukum secara prodeo	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 720.000,-
	Mendata Perkara yang yang diselesaikan secara prodeo	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring pada aplikasi SIPP terkait perkara yang diselesaikan prodeo	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
3.2	Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.								
1	NA	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV					
3.3	Indikator : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)									
1	Mendata Perkara yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	✓	✓	✓	✓	Menginput laporan layanan bantuan hukum (Posbakum) pada aplikasi pelaporan elektronik	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 28.000.000,-	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	NA	NA	NA	NA

No.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
4.1	Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)								
1	Menerima permohonan eksekusi	✓	✓	✓	✓	Menginput berkas eksekusi dari pemohon dan pada aplikasi PTSP	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari biaya proses para pihak berperkara
2	Membuat resume	✓	✓	✓	✓	Dokumen resume	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3	Membuat rincian biaya eksekusi dan pelaksanaan eksekusi	✓	✓	✓	✓	Rincian biaya eksekusi dan menginput pada SIPP	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Membuat tindak lanjut hasil resume	✓	✓	✓	✓	Dokumen tindak lanjut resume	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5	Membuat Aanmaning dan Penetapan sita Eksekusi	✓	✓	✓	✓	Aanmaning dan penetapan sita eksekusi	Penegakan dan Pelayanan	Peningkatan Manajemen Peradilan	

							Hukum	Umum	
6	Memberitahukan para pihak untuk dilakukan aanmaning	✓	✓	✓	✓	Pemanggilan para pihak oleh jurusita	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7	Membuat tindak lanjut hasil aanmaning dan penetapan eksekusi	✓	✓	✓	✓	Penetapan eksekusi dan pemberitahuan para pihak untuk eksekusi	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	